

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENGUMPULAN BUKTI PADA TAHAP PENYELIDIKAN

Marco *¹
Nova Ratu Sabina ²
Ricky Banke ³

^{1,2,3} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Medan
*e-mail: 03051220003@student.uph.edu, 03051220026@student.uph.edu, ricky.banke@uph.edu

Abstrak

Tahap penyelidikan dalam sistem peradilan pidana merupakan fase krusial yang menentukan arah penyidikan dan proses hukum selanjutnya. Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum utama memiliki peran penting dalam pengumpulan bukti yang sah dan akurat untuk mendukung proses hukum di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab kepolisian dalam pengumpulan bukti pada tahap penyelidikan di Indonesia, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kepolisian memiliki tanggung jawab besar dalam pengumpulan bukti, terdapat berbagai hambatan, termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan, masalah prosedural, dan dinamika kejahatan yang semakin kompleks seperti kejahatan siber. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan, pengadaan peralatan yang lebih canggih, dan reformasi regulasi yang lebih sesuai dengan perkembangan kejahatan modern. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperbaiki proses pengumpulan bukti agar lebih efektif dan adil, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas proses peradilan di Indonesia.

Kata kunci: Kepolisian, Pengumpulan Bukti, Penyelidikan, Sistem Peradilan Pidana, Indonesia

Abstract

The investigation stage in the criminal justice system is a critical phase that determines the direction of further investigation and legal proceedings. The police, as the primary law enforcement agency, play a crucial role in collecting valid and accurate evidence to support legal processes in court. This study aims to analyze the roles and responsibilities of the police in evidence collection during the investigation stage in Indonesia, as well as to identify the various challenges faced in this process. The study employs a qualitative approach, using data collection methods such as in-depth interviews, field observations, and document studies. The results indicate that although the police have a significant responsibility in evidence collection, they face numerous obstacles, including limited resources, lack of training, procedural issues, and the increasingly complex dynamics of crime, such as cybercrime. To overcome these challenges, there is a need for capacity building through training, procurement of more advanced equipment, and regulatory reforms that align with the development of modern crimes. This study provides recommendations for improving the evidence collection process to be more effective and fair, with the hope of enhancing the quality of the judicial process in Indonesia.

Keywords: Police, Evidence Collection, Investigation, Criminal Justice System, Indonesia

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tahap penyelidikan dalam sistem peradilan pidana adalah fase awal yang sangat krusial dalam penegakan hukum, karena menentukan arah penyidikan dan proses hukum selanjutnya. Kepolisian, sebagai lembaga penegak hukum yang pertama kali terlibat, memiliki tanggung jawab penting untuk mengumpulkan bukti yang sah dan akurat. Bukti ini akan menjadi dasar dalam

membangun kasus yang kuat di pengadilan, sehingga memungkinkan proses peradilan yang adil dan objektif.

Di Indonesia, pengumpulan bukti oleh kepolisian diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan internal kepolisian. KUHP memberikan wewenang bagi kepolisian untuk melakukan penyelidikan guna menemukan dan mengumpulkan bukti yang relevan dengan suatu kasus pidana. Namun, praktik di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya, keterampilan aparat, hingga masalah prosedural dan teknis. Tantangan ini dapat mempengaruhi kualitas dan keabsahan bukti yang dikumpulkan.

Selain itu, dinamika kejahatan di era modern, seperti kejahatan siber yang semakin kompleks dan transnasional, menuntut kepolisian untuk terus memperbarui teknik dan metodologi mereka dalam mengumpulkan bukti. Kegagalan untuk mengadaptasi metode pengumpulan bukti yang efektif dapat menyebabkan kesalahan penyelidikan, penundaan dalam proses hukum, dan bahkan pembebasan tersangka karena kurangnya bukti yang sah. Kasus-kasus yang mencuat ke permukaan sering kali menunjukkan adanya kekurangan dalam pengumpulan bukti, termasuk penggunaan metode yang tidak sah, kekurangan dokumentasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Masalah ini menunjukkan pentingnya penilaian yang cermat terhadap peran kepolisian dalam pengumpulan bukti di tahap penyelidikan.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai bagaimana kepolisian menjalankan tugas mereka dalam pengumpulan bukti dan bagaimana tantangan yang ada dapat diatasi. Dengan memahami permasalahan dan potensi solusi, diharapkan dapat terwujud sistem peradilan yang lebih efektif, efisien, dan adil di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang praktik pengumpulan bukti oleh kepolisian, mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian dan perbaikan, serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas proses peradilan pidana di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Apa saja peran dan tanggung jawab kepolisian dalam pengumpulan bukti pada tahap penyelidikan kasus kejahatan di Indonesia?
2. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam mengumpulkan bukti secara efektif dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan anggota kepolisian yang terlibat langsung dalam proses penyelidikan, saksi, dan ahli hukum. Observasi lapangan melibatkan pengamatan langsung terhadap proses pengumpulan bukti di lapangan, dan studi dokumen mencakup analisis peraturan perundang-undangan serta kasus-kasus relevan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Tanggung Jawab Kepolisian dalam Pengumpulan Bukti

Penelitian ini menemukan bahwa peran kepolisian dalam pengumpulan bukti pada tahap penyelidikan sangat penting untuk menentukan arah penyidikan dan proses hukum selanjutnya. Dalam proses ini, kepolisian melakukan berbagai kegiatan, antara lain:

1. Pemeriksaan Saksi dan Tersangka: Kepolisian bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan memeriksa saksi serta tersangka yang relevan dengan kasus yang sedang diselidiki. Proses ini mencakup mengumpulkan pernyataan, mengonfirmasi alibi, dan mencari keterkaitan antara saksi, tersangka, dan peristiwa tindak pidana.
2. Pengumpulan Barang Bukti Fisik: Pengumpulan barang bukti fisik, seperti senjata, dokumen, atau barang yang berkaitan dengan kejahatan, merupakan tugas utama kepolisian. Bukti fisik ini harus dikumpulkan dengan cara yang sah dan didokumentasikan secara cermat untuk memastikan dapat diterima di pengadilan.
3. Analisis Forensik: Teknologi forensik, seperti analisis sidik jari, DNA, atau jejak digital, digunakan untuk memperkuat bukti yang telah dikumpulkan. Dalam kasus kejahatan modern, seperti kejahatan siber, analisis forensik komputer sering kali menjadi bagian penting dari penyelidikan.
4. Koordinasi dengan Lembaga Lain: Kepolisian juga bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain yang terkait, seperti kejaksaan, pengadilan, dan lembaga forensik. Koordinasi ini diperlukan untuk memastikan bukti yang dikumpulkan dapat digunakan secara efektif dalam proses hukum.

Kendala dan Tantangan yang Dihadapi Kepolisian

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa kendala utama yang dihadapi oleh kepolisian dalam pengumpulan bukti:

1. Keterbatasan Sumber Daya: Banyak satuan kepolisian di Indonesia masih menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari segi peralatan forensik, teknologi informasi, maupun infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pengumpulan bukti yang efektif. Kurangnya anggaran sering kali mengakibatkan keterbatasan dalam pengadaan peralatan forensik yang mutakhir dan pelatihan yang memadai bagi aparat.
2. Kurangnya Pelatihan dan Keterampilan: Penelitian ini menemukan bahwa tidak semua aparat kepolisian memiliki keterampilan yang memadai untuk menangani bukti, terutama dalam menghadapi kasus-kasus yang membutuhkan penanganan khusus, seperti kejahatan siber atau kejahatan dengan modus operandi yang rumit. Ketidakmampuan ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pengumpulan bukti atau bahkan pelanggaran prosedur yang dapat mengakibatkan bukti menjadi tidak sah.
3. Kendala Prosedural dan Hukum: Ada berbagai kendala prosedural yang terkait dengan regulasi yang mengatur pengumpulan bukti. Regulasi yang ada terkadang tidak mencakup semua aspek yang dibutuhkan untuk menghadapi kejahatan modern, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dan hambatan dalam proses penyelidikan.
4. Teknologi Kejahatan yang Semakin Kompleks: Perkembangan teknologi telah meningkatkan kompleksitas kejahatan yang harus dihadapi oleh kepolisian, seperti kejahatan siber, pemalsuan digital, dan penggunaan teknologi tinggi untuk melakukan tindak pidana. Hal ini menuntut kepolisian untuk terus mengembangkan teknik dan metode baru dalam pengumpulan bukti.

Strategi untuk Meningkatkan Pengumpulan Bukti

Untuk meningkatkan kualitas pengumpulan bukti, penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi, antara lain:

1. Peningkatan Pelatihan dan Pendidikan: Memberikan pelatihan berkelanjutan bagi aparat kepolisian mengenai teknik pengumpulan bukti terbaru, termasuk penggunaan teknologi forensik dan metode penyidikan modern. Pelatihan ini harus mencakup simulasi kasus-kasus kompleks, seperti kejahatan siber, untuk memastikan aparat siap menghadapi berbagai situasi di lapangan.
2. Pengadaan Peralatan Forensik yang Canggih: Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengadaan peralatan forensik yang canggih dan teknologi informasi yang diperlukan untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti dengan lebih efektif.
3. Reformasi Regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP): Meninjau dan merevisi regulasi yang ada untuk memastikan kesesuaiannya dengan dinamika kejahatan yang terus berkembang. SOP kepolisian perlu diperbarui agar mencakup teknik-teknik pengumpulan bukti yang lebih modern dan efisien.
4. Penguatan Kerjasama Antar Lembaga: Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait, seperti kejaksaan, lembaga forensik, dan institusi internasional, untuk berbagi pengetahuan, teknologi, dan sumber daya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa peran kepolisian dalam pengumpulan bukti di tahap penyelidikan sangat penting untuk menentukan keberhasilan proses hukum di pengadilan. Sebagai lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti yang sah dan akurat, kepolisian menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan, masalah prosedural, dan perubahan dinamika kejahatan yang semakin kompleks, seperti kejahatan siber.

Meskipun tantangan tersebut signifikan, ada peluang untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan bukti melalui beberapa strategi, antara lain peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi aparat, pengadaan peralatan forensik yang lebih canggih, reformasi regulasi dan standar operasional prosedur (SOP), serta penguatan kerjasama antar lembaga penegak hukum. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini, kepolisian diharapkan dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan efisien.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa reformasi kebijakan yang mendukung peningkatan kapasitas kepolisian sangat penting untuk menghadapi perkembangan kejahatan modern. Kebijakan ini harus mencakup alokasi anggaran yang lebih besar untuk pelatihan dan teknologi, serta perumusan regulasi yang responsif terhadap tantangan dan kebutuhan lapangan.

Secara keseluruhan, perbaikan dalam proses pengumpulan bukti oleh kepolisian tidak hanya akan meningkatkan kualitas sistem peradilan pidana di Indonesia, tetapi juga memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan lebih baik. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan memastikan bahwa hak-hak semua pihak, baik korban maupun terdakwa, dilindungi dengan adil dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, O. S. (1990). **Hukum Acara Pidana Indonesia**. Jakarta: Erlangga.
Arief, B. N. (2014). **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**. Jakarta: Prenada Media.

-
- Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Routine Activity Theory: A Framework for Analyzing Crime Rate Trends and Social Change. *American Sociological Review*, 44*(4), 588-608.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches**. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). *Cultures and Organizations: Software of the Mind, Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival**. New York: McGraw-Hill.
- Indonesian National Police (Polri). (2019). *Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Pengumpulan Bukti di Tahap Penyelidikan dan Penyidikan**. Jakarta: Polri.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.